

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 2013).

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrument strategis dalam perekonomian (Christopher, 2009). Pemanfaatan belanja hendaknya di alokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung. Dalam membiayai belanja daerah diperlukan pendapatan daerah yang memadai.

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Mangowal, 2013). Menurut (Halim dan Kusufi, 2012) menyatakan bahwa Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. (Halim, 2004).

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka & Elim, 2014). Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan system perpajakan, dan koreksi ketidak efisienan fiskal (Santoso & Suparta, 2015).

Hal ini dapat terlihat di Kabupaten Lembata, setiap daerah memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Setiap pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah atau yang lebih di kenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain komponen-komponennya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah belanja daerah Kabupaten Lembata dari tahun 2001-2020.

Tabel 1.1
Belanja Daerah Di Kabupaten Lembata
Tahun 2001– 2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah		Total Belanja Daerah (Miliar Rupiah)
	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
2001	31.339.720.000	11.655.520.000	42.995.240.000
2002	38.710.957.000	41.061.042.000	79.771.999.000
2003	71.749.204.000	23.910.656.000	95.659.860.000
2004	63.181.822.000	20.931.619.000	84.113.441.000
2005	67.895.980.000	48.540.207.000	116.436.187.000
2006	105.934.832.000	95.852.935.000	201.787.767.000
2007	125.079.837.000	107.693.290.000	232.773.127.000
2008	187.310.494.000	130.853.191.000	318.163.685.000
2009	139.153.725.000	174.888.522.000	314.042.247.000
2010	122.722.543.000	193.647.859.000	316.370.403.000
2011	159.993.377.000	183.133.170.000	343.126.547.000
2012	220.029.049.000	245.804.097.000	465.833.146.000
2013	244.686.701.000	269.743.313.000	514.430.014.000
2014	181.670.577.000	290.011.068.000	471.681.645.000
2015	241.395.327.000	355.970.202.000	597.365.529.000
2016	322.154.421.000	463.272.728.000	785.427.149.000
2017	286.777.828.000	451.666.732.000	738.444.560.000
2018	358.940.746.000	436.210.643.000	795.151.389.000
2019	412.675.319.000	499.104.395.000	911.779.714.000
2020	361.046.566.000	500.450.116.000	861.496.682.000

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah belanja daerah yang dianggarkan Kabupaten Lembata dalam tahun 2001-2020 selalu mengalami fluktuatif tahun ke tahun. Pada tahun 2001 sampai tahun 2008, jumlah belanja daerah yang dikeluarkan mengalami kenaikan. Tahun 2001 jumlah belanja daerah Kabupaten Lembata sebesar Rp. 42.995.240.000 dan terus menerus meningkat sampai pada tahun 2008 menjadi Rp. 318.163.685.000. Namun pada tahun 2009 jumlah belanja daerah juga mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2010

sampai tahun 2013 jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lembata kembali mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah belanja daerah di kabupaten Lembata setiap tahun ke tahun berikutnya terjadi ketidakstabilan. Total belanja daerah Kabupaten Lembata periode 2001-2020 adalah Rp. 8.286.850.331.000 dengan jumlah belanja daerah terendah yaitu tahun 2001 sebesar Rp. 42.995.240.000 dan jumlah belanja daerah tertinggi pada tahun 2019 adalah Rp. 911.779.714.000.

Biaya belanja daerah yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten Lembata yang sangat besar yaitu biaya belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat umum. Kegiatan-kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan investasi yang menambahkan aset daerah.

Belanja daerah Kabupaten Lembata yang selalu mengalami peningkatan dan penurunan dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, PAD dan dana perimbangan. Hal ini sesuai pendapat Wantara (2015) bahwa kemampuan suatu daerah untuk melakukan belanja daerah dipengaruhi oleh dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta pendapatan asli daerah itu sendiri. Berikut ini akan disajikan mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata dari tahun 2001-2020

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lembata
Tahun 2001– 2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				Total Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan yang sah	
2001	332.648.000	358.040.000	-	1.066.000.000	1.756.688.000
2002	487.975.000	759.264.000	81.689.000	3.986.119.000	5.297.047.000
2003	768.630.000	956.817.000	-	-	1.725.447.000
2004	1.233.698.000	1.892.367.000	268.092.000	1.660.600.000	5.054.757.000
2005	938.742.000	1.506.304.000	418.273.000	1.731.471.000	4.594.790.000
2006	992.346.000	5.061.412.000	683.341.000	2.431.987.000	9.099.086.000
2007	1.066.156.000	3.349.435.000	776.648.000	4.540.524.000	9.732.762.000
2008	1.523.706.000	5.129.538.000	1.090.873.000	8.074.658.000	15.818.802.000
2009	1.448.550.000	5.120.403.000	1.253.687.000	8.189.452.000	16.012.092.000
2010	1.971.387.000	6.243.245.000	1.654.371.000	3.986.805.000	13.855.807.000
2011	2.092.810.000	8.168.539.000	2.278.004.000	5.019.350.000	17.558.703.000
2012	2.639.689.000	7.482.408.000	2.798.727.000	8.382.763.000	21.303.587.000
2013	7.861.369.000	9.742.886.000	3.781.000.000	5.391.875.000	26.777.130.000
2014	3.842.202.000	9.496.834.000	4.493.170.000	10.771.299.000	28.603.505.000
2015	5.407.992.000	8.649.300.000	4.990.789.000	9.787.732.000	28.835.813.000
2016	8.001.534.000	9.381.094.000	5.072.858.000	13.268.182.000	35.723.669.000
2017	7.014.880.000	9.862.260.000	4.702.688.000	16.413.087.000	37.992.916.000
2018	7.709.039.000	13.961.101.000	5.102.241.000	16.109.426.000	42.882.808.000
2019	12.326.988.000	37.075.102.000	-	20.513.414.000	69.915.504.000
2020	8.784.242.000	18.961.480.000	4.974.433.000	11.531.540.000	44.251.442.000

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata dari tahun 2001-2020 selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Total pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata dari tahun 2001-2020 sebesar Rp. 436.801.355.000 dengan jumlah pendapatan asli daerah terendah yaitu tahun 2003 sebesar Rp. 1.725.447.000 dan jumlah pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 69.915.504.000.

Naik turunnya pendapatan asli daerah di kabupaten Lembata, sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut

semakin banyak, maka akibatnya pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Walaupun dalam prakteknya, peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga diperoleh dari pos-pos bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah dan penerimaan dari pemerintah, tetapi penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi indikator utama. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini bukan merupakan hal suatu hal yang gampang, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti tingkat jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan inflasi.

Dalam proses pembangunan dan pelayanan publik sebagian besar dana yang dipergunakan adalah berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah dana perimbangan Kabupaten Lembata dari tahun 2001-2020.

Tabel 1.3
Dana Perimbangan di Kabupaten Lembata
Tahun 2001–2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan			Total Dana Perimbangan (Miliar Rupiah)
	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	
2001	5.726.415.000	88.603.701.000	-	94.330.116.000
2002	6.440.866.000	97.210.000.000	-	102.369.179.000
2003	11.914.927.000	111.550.000.000	6.800.000.000	130.264.927.000
2004	9.538.660.000	121.234.000.000	8.600.000.000	139.372.660.000
2005	10.683.780.000	128.017.000.000	11.436.187.000	151.400.780.000
2006	15.760.264.000	166.668.000.000	22.460.000.000	204.888.264.000
2007	17.796.731.000	188.166.000.000	47.822.000.000	253.784.731.000
2008	18.446.954.000	213.794.941.000	53.554.000.000	285.795.895.000
2009	17.088.271.000	223.441.639.000	48.983.000.000	289.512.910.000
2010	19.675.218.000	235.657.505.000	30.835.100.000	286.167.823.000
2011	14.746.289.000	263.396.599.000	45.964.600.000	326.940.512.000
2012	17.851.536.000	314.176.964.000	50.477.450.000	382.505.950.000
2013	14.839.888.000	352.353.778.000	52.767.600.000	419.961.266.000
2014	15.079.483.000	388.625.200.000	64.233.750.000	467.938.433.000
2015	9.926.829.000	418.139.104.000	56.528.553.000	484.594.486.000
2016	12.066.783.000	467.239.940.000	125.644.773.000	604.951.496.000

Tahun	Dana Perimbangan			Total Dana Perimbangan (Miliar Rupiah)
	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	
2017	10.258.833.000	462.207.950.000	92.341.728.000	564.128.647.000
2018	8.473.361.000	466.007.663.000	136.212.752.000	609.846.502.000
2019	7.201.336.000	487.100.063.000	198.763.601.000	693.065.000.000
2020	7.286.343.000	443.588.603.000	160.481.366.000	611.356.312.000

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dana perimbangan kabupaten Lembata pada tahun 2001-2020 selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Total dana perimbangan kabupaten lembata sebesar Rp. 6.817.665.889.000 dengan jumlah dana perimbangan terendah pada tahun 2001 sebesar Rp. 94.330.116.000 dan jumlah dana perimbangan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 693.065.000.000.

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah di kabupaten Lembata dari APBN yang terbesar adalah DAU yang bertujuan sebagai dana pembangunan.

Faktor penyebab dana perimbangan Kabupaten Lembata mengalami peningkatan dan penurunan adalah rendahnya sumber daya alam dan relatif padatnya penduduk dengan sarana prasaran yang kurang memadai, maka transfer dana ke daerah relatif besar. Sebaliknya jika daerah kaya sumber daya alam, jumlah penduduknya relatif sedikit dengan infrastruktur yang memadai maka daerah ini disebut mandiri yang mampu melaksanakan otonomi daerah sehingga tidak membutuhkan transfer dana dari pusat.

Dari Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 diatas diketahui pendapatan asli daerah dan dana perimbangan Kabupaten Lembata dari tahun 2001-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Maka perlu adanya peningkatan dalam pendapatan asli daerah, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut dapat meningkatkan anggaran belanja daerah. Dengan begitu pendapatan asli daerah kabupaten Lembata perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal, yang di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi dan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memilih judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN LEMBATA”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, maka di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah di Kabupaten Lembata?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lembata?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara Simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lembata?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan

dan Belanja Daerah di Kabupaten Lembata.

2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan secara Parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lembata.
3. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara Simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lembata.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran pemahaman terkait tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.
- b. Manfaat Bagi Akademik sebagai informasi dan gambaran yang bermanfaat tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah bagi peneliti berikutnya.
- c. Manfaat bagi peneliti Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.